

### Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan di Desa Meranti Bunting

Puji Afriyeni<sup>1</sup>, Anisa Fitriani<sup>2</sup>, Arifah Mawaddah<sup>3</sup>, Oktavia Saputri<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

[afrienipuji056@gmail.com](mailto:afrienipuji056@gmail.com)<sup>1</sup>, [nisa27052019@gmail.com](mailto:nisa27052019@gmail.com)<sup>2</sup>, [arifahmawadda1108@gmail.com](mailto:arifahmawadda1108@gmail.com)<sup>3</sup>,

[saputrioktavia17@gmail.com](mailto:saputrioktavia17@gmail.com)<sup>4</sup>

Diserahkan tanggal 06 Juni 2024 | Diterima tanggal 19 September 2024 | Diterbitkan tanggal 30 September 2024

#### Abstract:

Public sector accounting is closely related to the application and treatment of accounting in the public domain. The public sector itself is broader and more complex than the private sector. The use of APBD or village funds is currently required to have efficient financial accountability. Government accounting plays an important role in public sector financial management which is useful in supporting the realization of efficiency and effectiveness in financial management. This research was conducted to analyze accountability reporting procedures in Meranti Bunting Village. The type of research carried out is quantitative descriptive research using secondary data. This research studies accounting policies, budgeting processes, and the size of village government financial transactions, which are smaller than regional governments. In this research, it was found that the policies implemented by the Meranti Bunting Village government had complied with and were implemented in accordance with applicable regulations, and were then considered accountable in presenting their accountability reports. And the existence of a village-based accounting information system (SISKEUDES) helps, village officials are becoming more serious in preparing financial accounting reports for village funds

**Keywords:** Public sector accounting, application of financial reports, and accountability.

#### Abstrak :

Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan penerapan dan juga perlakuan akuntansi pada domain publik. Sektor publik itu sendiri lebih luas dan lebih kompleks dari pada sektor swasta. Penggunaan APBD atau dana desa sekarang ini dituntut untuk mempunyai akuntabilitas keuangan yang efisien. Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang berguna dalam mendukung terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam manajemen keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur pelaporan pertanggungjawaban di Desa Meranti Bunting. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini mempelajari tentang kebijakan akuntansi, proses penganggaran, dan besaran transaksi keuangan pemerintah desa yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah Desa Meranti Bunting sudah mematuhi dan dijalankan sesuai dengan peraturan berlaku, kemudian dinilai akuntabel dalam penyajian laporan pertanggungjawabannya. Serta terdapatnya sistem informasi akuntansi berbasis desa (SISKEUDES) membantu, perangkat desa semakin serius dalam menyusun laporan akuntansi keuangan dana desa.

**Kata Kunci:** Akuntansi Sektor Publik, penerapan laporan keuangan, dan pertanggung jawaban.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan sistem informasi yang berupa laporan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas suatu perusahaan dan kondisi perekonomian. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa mengumpulkan, memproses, mengklarifikasi, menganalisis dan menyajikan dalam bentuk angka atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerima perekonomiannya dalam bentuk informasi laporan keuangan (Nazi 2020).

Akuntansi sektor publik sangat berkaitan dengan penerapan dan juga perlakuan akuntansi pada domain publik. Sektor publik itu sendiri lebih luas dan lebih kompleks daripada sektor swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak hanya bergantung pada ragam luasnya jenis dan bentuk organisasi yang ada di dalamnya, tetapi juga karena kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah) serta unit kerja negara, BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi publik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dan organisasi nirlaba lainnya.

Perkembangan standar saat ini dimulai dengan dikeluarkan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Ini dikenal dengan nama basis kas. Ini dibuktikan dengan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang SAP ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif.

Standar Akuntansi Pemerintahan berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Dalam melakukan penelitian mengenai implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan di Desa Meranti Bunting, beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan bisa menjadi referensi. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang sering dijadikan acuan:

1. Penelitian tentang Implementasi Akuntansi Sektor Publik di Tingkat Desa  
Penelitian oleh Indrawati (2017) menyoroti penerapan akuntansi sektor publik di desa-desa terpencil di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penerapan tersebut. Temuan

menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa terhadap standar akuntansi publik masih rendah, sehingga sering kali pelaporan keuangan belum sepenuhnya akurat dan sesuai standar.

#### 2. Studi tentang Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)

Permana (2019) melakukan studi mengenai implementasi Siskeudes di beberapa desa di Sumatra. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa desa-desa yang telah menerapkan Siskeudes cenderung memiliki pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, tantangan seperti kurangnya pelatihan dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala utama.

#### 3. Pengaruh Regulasi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Rahmawati (2018) dalam penelitiannya tentang peran kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa menemukan bahwa kebijakan pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah pusat berperan besar dalam mendorong implementasi akuntansi yang lebih baik di tingkat desa. Desa yang mendapatkan pembinaan intensif lebih mudah dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik.

#### 4. Penelitian tentang Tata Kelola Keuangan Desa di Riau

Syafrudin (2020) mengkaji tata kelola keuangan di beberapa desa di Provinsi Riau, termasuk di daerah pesisir. Penelitian ini menunjukkan bahwa desa yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, mampu mengelola dana desa secara lebih efektif. Studi ini juga mengidentifikasi bahwa dukungan teknis dan pengawasan dari pihak pemerintah daerah sangat membantu keberhasilan implementasi akuntansi sektor publik.

#### 5. Studi Kasus di Desa Meranti Bunting

Meskipun belum ada penelitian spesifik yang banyak dibahas secara luas terkait Desa Meranti Bunting, penelitian terkait daerah terpencil di Riau oleh Yusuf (2021) menekankan pentingnya adaptasi teknologi informasi keuangan di desa-desa terpencil. Desa seperti Meranti Bunting yang relatif terisolasi menghadapi tantangan lebih besar dalam hal akses terhadap pelatihan dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan akuntansi sektor publik yang efektif.

Referensi-referensi ini menunjukkan pentingnya pelatihan, kebijakan yang tepat, serta infrastruktur yang mendukung dalam implementasi akuntansi sektor publik di desa, khususnya di daerah seperti Meranti Bunting yang mungkin menghadapi tantangan tersendiri karena lokasi dan keterbatasan sumber daya

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah pada laporan keuangan Kantor Desa Meranti Bunting menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan secara detail dan sistematis. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, dan menganalisis data tersebut untuk memberikan deskripsi yang akurat dan terperinci tentang fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang memecahkannya.

Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya yaitu melalui wawancara langsung dengan staf bagian keuangan kantor Desa Meranti Bunting. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, jurnal ilmiah dan *internet website*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kasus.

## **PEMBAHASAN**

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntansi dasar merupakan factor lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Maka dari itu, perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah maupun dalam membantu UKM dalam merapihkan pembukuan bisnisnya. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Sinurat, M., Royadi, & Simanjuntak 2020).

Menurut Mujiaty yulia Ekonomi fundamental umumnya berfokus pada ruang lingkup ekonomi akuntansi pada sektor publik (Mujiaty and Lavita 2019). Sedangkan Akuntansi sendiri adalah bidang ilmu yang mempengaruhi tingkat perkembangan perusahaan atau pemerintah dan menetapkan kondisi dimana keuntungan akan didapat. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang mempunyai tujuan (*purposive activity*) untuk memenuhi visi yang telah ditetapkan. Organisasi non-profit atau yang sering disebut sektor publik beroperasi dalam ruang lingkup yang terbilang kompleks. Faktor ekonomi, budaya, demografis, dan politik merupakan komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor public.

### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi khususnya pada pemerintahan desa sudah diatur dalam Permendagri (No.64 Tahun 2013). Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan kebijakan dengan laporan keuangan dibagi menjadi kebijakan yang berkaitan kebijakan akuntansi dan kebijakan dengan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi terkait pemberitahuan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan bertujuan meningkatkan perbandingan laporan keuangan untuk mencukupi kebutuhan bersama dalam mayoritas pengguna. Dalam mencapai tujuannya, kebijakan ini mengatur segala pertimbangan atas penyajian, pedoman struktur, dan persyaratan minimum atas isi laporan keuangan. Laporan keuangan tersusun menggunakan metode basis kas .

Kebijakan ini berperan penting bagi entitas akuntansi dan pelapor dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Pemerintah daerah adalah entitas pelapor, sedangkan adalah SKPD dan PPKD adalah entitas akuntansi. Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Desa yang ada di Desa Meranti Bunting, saat ini menggunakan sistem pencatatan akuntansi dengan sistem komputerisasi yaitu

dengan menggunakan program Microsoft Excel yang berupa Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran. Selain itu, buku kas lain yang digunakan yaitu Buku Kas Umum yang merupakan buku kas yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit. Dan Buku Kas Pembantu Penerimaan serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran yaitu buku kas yang digunakan untuk mencatat setiap pemasukan sumber dana yang diterima, dan mencatat setiap transaksi transaksi pengeluaran yang akan dijabarkan ke dalam Buku Kas Pengeluaran sesuai dengan APBDesa.

Sedangkan penerapan Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun 2023 di Desa Meranti Bunting, cukup baik dan realistis karena sudah tersusun di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Proses pengelolaan desa akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengelola keuangan desa tersebut. Tak hanya meliputi kegiatan, namun pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk penerapan akuntansi yang digunakan dalam suatu desa. Desa Meranti Bunting ini juga, transaksi telah dijurnal, dan bendahara telah menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes. Dengan demikian, bukan hanya memakai kwitansi dan catatan dalam menilai kas masuk dan kas keluar di desa, bendahara juga wajib membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui sistem akuntansi desa yang telah diterapkan.

### **Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Sistem Keuangan di Desa Meranti Bunting**

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan jika Desa Meranti Bunting telah menjalankan prosedur pengelolaan desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes merupakan salah satu dari tugas dan kepentingan desa Meranti Bunting. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan yang membawa pengaruh terhadap kebijakan atas pengelolaan dan implementasi dana desa menggunakan sistem SISKEUDES pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban di desa Meranti Bunting sudah sesuai dengan pedoman aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Implementasi yang telah dilakukan desa Meranti Bunting meliputi penggunaan/implementasi siskeudes sesuai dengan fungsinya yang dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Sistem tata kelola keuangan desa Meranti Bunting sudah sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keungan desa dibuktikan dengan laporan yang diperoleh pada aplikasi siskeudes desa Meranti Bunting (Megawati Lestari 2023).

Prosedur penyusunan anggaran desa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebelum disusun terlebih dahulu pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), untuk mengundang peran masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan di desa. Penyusunan RKPDesa digunakan sebagai gambaran konkrit dari beberapa program kerja yang dilakukan dalam waktu satu tahun. Dengan demikian, proses pembangunan desa akan lebih terfokus dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkelanjutan. Rencana kerja Pembangunan Desa Meranti Bunting Tahun 2023 telah dibentuk sesuai dengan peraturan yang ada, Pihak desa Meranti Bunting melakukan proses penyusunan APBDes mulai dari Proses penyusunan peraturan desa tentang APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa, kemudian sekretaris menyampaikan rancangan peraturan kepada kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk disepakati bersama, dan setelah itu disepakati rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa Meranti Bunting kepada Bupati Kabupaten Selat Panjang untuk dilakukan evaluasi. (Erika Rahma Setiyani and Risky Nurfadila 2022) Tahapan APBDes yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Meranti Bunting Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Meranting Bunting Tahun Anggaran 2023.

Realisasi s.d 31/12/2023					
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	5.551.000,00	5.551.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.551.000,00	5.551.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	5.551.000,00	5.551.000,00	0,00
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	1.570.571.000,00	1.570.571.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	783.985.000,00	783.985.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	783.985.000,00	783.985.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	614.586.000,00	614.586.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	614.586.000,00	614.586.000,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.576.122.000,00</b>	<b>1.576.122.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.668.751.548,00</b>	<b>1.660.485.148,00</b>	<b>8.266.400,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(92.629.548,00)</b>	<b>(84.363.148,00)</b>	<b>(8.266.400,00)</b>
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	92.629.548,00	92.629.548,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	92.629.548,00	92.629.548,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	92.629.548,00	92.629.548,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			<b>92.629.548,00</b>	<b>92.629.548,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266.400,00</b>	<b>(8.266.400,00)</b>

Hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Desa meranti bunting tahun 2023 sesuai dengan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu kesesuaian terletak pada kesamaan pada lampiran A IV Kode Rekening pendapatan Kabupaten/Kota yang diatur dalam permendagri.

Sesuai dengan SAP yang kami telaah, Laporan Realisasi Anggaran ini menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing akan dibandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Penggunaan Laporan Realisasi Anggaran ini minimal setahun sekali. Dalam situasi tertentu tanggal laporan entitas dapat berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan akan disajikan dengan periode yang lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan dalam penggunaan periode pelaporan tidak untuk satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Ada beberapa manfaat Laporan Realisasi Anggaran yang akan berkurang jika laporan tidak tersedia tepat waktu. Pelapor wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Realisasi Anggaran di Desa Meranti Bunting ini menggunakan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang hanya diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran membandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA.

## SIMPULAN

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan desa Meranti Bunting sudah mematuhi aturan sesuai peraturan yang ada. Kemudian, penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis desa (Siskeudes) membuktikan bahwa pemerintah desa Meranti Bunting selama ini bekerja keras dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya. Kekompakan dan budaya masyarakat Desa Meranti Bunting mendukung jalannya pemerintahan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat dalam perencanaan keuangan dan pembangunan desa. Selain itu, APBDes 2023 sudah disusun sesuai dengan Permenagri 113 Tahun 2014. Penempatandalam APBDes juga sudah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erika Rabma Setiyani, And Risky Nurfadila. 2022. "Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan Desa." *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1(2): 72–82.
- Megawati Lestari, Devi Astriani, Thomas Nadeak. 2023. "Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)." *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 2(4): 768–82.  
<http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/JMMA/article/view/820>.
- Mujiaty, Yulia, and Lavita. 2019. "Akuntansi Sektor Publik." *Akuntansi Sektor Publik*.
- Nazi, M F. 2020. "Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti."  
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11865%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11865/1/15>

5311019.pdf.

Sinurat, M., Royadi, & Simanjuntak, T. H. 2020. "*Cara Cerdas dan Mabir Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah. Pustaka Rahmat*".